

INTEGRASI PENDIDIKAN DAN PEMBANGUNAN EKONOMI DALAM MEWUJUDKAN SDGS



Prof. Dr. Thamrin Tahir, M.Si. | Noor Hasana Hakim, S.Pd., M.Pd.

Eliza Junita A, SE., M.Pd. | Dr. Ratnah S, S.Pd., M.Pd.

Wulan Purnamasari, S.Pd., M.Pd. | Alfiana Damasinta, S.IP., M.Pd.

Dr. Andi Caesar To Tadampali, S.E., M.M. | Sri Hutami Adiningsih S, S.Pd., M.Pd.

Dr. Muhammad Ilyas Thamrin Tahir, S.Pd., M.Pd.

Nurfahima, S.Pd., M.Pd., Nurliana, M.Pd. | Ika Wisudawaty, S.Pd., M.Pd.

Septiannisa Paramita, S.Pd., M.Pd. | Andi Zulitsnayarti Mardhani Syam, S.Pd., M.Pd.

Is Arianto Pratama, S.Kel., M.Si.

Editor: Sri Hutami Adiningsih S, S.Pd., M.Pd.

INTEGRASI PENDIDIKAN DAN PEMBANGUNAN EKONOMI DALAM MEWUJUDKAN *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* (SDGs)

Prof. Dr. Thamrin Tahir, M.Si.

Noor Hasana Hakim, S.Pd., M.Pd.

Eliza Junita A, SE., M.Pd.

Dr. Ratnah S, S.Pd., M.Pd.

Wulan Purnamasari, S.Pd., M.Pd.

Alfiana Damasinta, S.IP., M.Pd.

Dr. Andi Caesar To Tadampali, S.E., M.M.

Sri Hutami Adiningsih S, S.Pd., M.Pd.

Dr. Muhammad Ilyas Thamrin Tahir, S.Pd., M.Pd.

Nurfahima, S.Pd., M.Pd.

Nurliana, M.Pd.

Ika Wisudawaty, S.Pd., M.Pd.

Septiannisa Paramita, S.Pd., M.Pd.

Andi Zulitsnayarti Mardhani Syam, S.Pd., M.Pd.

Is Arianto Pratama, S.Kel., M.Si.



Tahta Media Group

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

INTEGRASI PENDIDIKAN DAN PEMBANGUNAN EKONOMI DALAM MEWUJUDKAN *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* (SDGs)

Penulis:

Prof. Dr. Thamrin Tahir, M.Si. | Noor Hasana Hakim, S.Pd., M.Pd.
Eliza Junita A, SE., M.Pd. | Dr. Ratnah S, S.Pd., M.Pd.
Wulan Purnamasari, S.Pd., M.Pd. | Alfiana Damasinta, S.IP., M.Pd.
Dr. Andi Caezar To Tadampali, S.E., M.M. | Sri Hutami Adiningsih S, S.Pd., M.Pd.
Dr. Muhammad Ilyas Thamrin Tahir, S.Pd., M.Pd. | Nurfahima, S.Pd., M.Pd.
Nurliana, M.Pd. | Ika Wisudawaty, S.Pd., M.Pd.
Septiannisa Paramita, S.Pd., M.Pd.
Andi Zulitsnayarti Mardhani Syam, S.Pd., M.Pd.
Is Arianto Pratama, S.Kel., M.Si.

Desain Cover:

Tahta Media

Editor:

Sri Hutami Adiningsih S, S.Pd., M.Pd.

Proofreader:

Tahta Media

Ukuran:

xiv, 457, Uk: 15,5 x 23 cm

ISBN: 978-634-262-167-7

Cetakan Pertama:

April 2026

Hak Cipta 2026, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2026 by Tahta Media Group

All Right Reserved

PENERBIT TAHTA MEDIA GROUP

Perumahan Mitra Utama Residence 3 Blok A no 1, Sawahan, Tempel,
Kec. Gatak, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57557

email: tahtaliterasimedia@gmail.com

website: <http://store.tahtamedia.co.id/>

Anggota IKAPI (216/JTE/2021)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga buku berjudul “*Integrasi Pendidikan dan Pembangunan Ekonomi dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs)*” ini dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini disusun sebagai kontribusi akademik dalam memperkaya literatur mengenai pentingnya sinergi antara sektor pendidikan dan pembangunan ekonomi dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan. Pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Melalui pendidikan yang inklusif, adaptif, dan relevan dengan perkembangan zaman, masyarakat diharapkan mampu meningkatkan kapasitas intelektual, keterampilan, serta daya saing dalam menghadapi dinamika ekonomi global. Di sisi lain, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan memerlukan dukungan sumber daya manusia yang kompeten, kreatif, dan inovatif. Oleh karena itu, integrasi antara pendidikan dan pembangunan ekonomi menjadi salah satu strategi penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan sebagaimana dicanangkan oleh *Sustainable Development Goals (SDGs)*.

Buku ini terdiri dari 23 bab yang membahas berbagai perspektif mengenai hubungan antara pendidikan dan pembangunan ekonomi, mulai dari kajian konseptual, kebijakan, hingga praktik implementasi di berbagai konteks. Setiap bab ditulis oleh para akademisi dan praktisi yang memiliki perhatian dan kepedulian terhadap upaya peningkatan kualitas pendidikan serta pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Melalui beragam pendekatan dan sudut pandang yang disajikan, buku ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana pendidikan dapat berperan sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi sekaligus sebagai instrumen strategis dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Kami menyadari bahwa penyusunan buku ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh penulis yang telah berkontribusi dalam penyusunan setiap bab, serta kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moral maupun intelektual dalam proses penyelesaian buku ini.

Akhirnya, kami berharap buku ini dapat memberikan manfaat bagi kalangan akademisi, peneliti, mahasiswa, pembuat kebijakan, serta masyarakat luas yang memiliki perhatian terhadap pengembangan pendidikan dan pembangunan ekonomi dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Kami juga menyadari bahwa buku ini masih memiliki berbagai keterbatasan, sehingga kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Semoga buku ini dapat menjadi salah satu referensi yang bermanfaat dalam mendukung upaya mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan.

Makassar, 11 Maret 2026

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
BAB 1 PENDIDIKAN, EKONOMI, DAN SDGS.....	1
Prof. Dr. Thamrin Tahir, M.Si.	
Universitas Negeri Makassar	
A. Pendahuluan.....	1
B. Pendidikan sebagai Fondasi Pembangunan Berkelanjutan.....	3
C. Peran Pendidikan dalam Pembangunan Ekonomi	14
D. Pendidikan, Ekonomi, dan Agenda <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs)	15
E. Integrasi Pendidikan dan Ekonomi dalam Pembangunan Berbasis Masyarakat.....	17
F. Studi Kasus Indonesia: Pendidikan sebagai Penggerak Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan	19
Referensi.....	22
Profil Penulis	24
BAB 2 PENDIDIKAN DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	25
Prof. Dr. Thamrin Tahir, M.Si.	
Universitas Negeri Makassar	
A. Pendahuluan.....	25
B. Fondasi Perubahan Perilaku dan Pola Pikir	28
C. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas	29
D. Instrumen Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan (Aspek Sosial)	31
E. Pilar Hubungan Tiga Dimensi Keberlanjutan.....	32
F. Prinsip Belajar Sepanjang Hayat (<i>Lifelong Learning</i>).....	33
G. Kesimpulan.....	34
Referensi.....	36
Profil Penulis	39
BAB 3 PENDIDIKAN DAN KUALITAS SDM	40
Noor Hasana Hakim, S.Pd., M.Pd	
Universitas Negeri Makassar	
A. Pendahuluan.....	40
B. Pendidikan sebagai Investasi SDM (<i>Human Capital</i>)	41

C. Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	47
D. Kesesuaian Pendidikan dengan Kebutuhan Dunia Kerja.....	53
Referensi.....	58
Profil Penulis	59
BAB 4 LITERASI EKONOMI DAN KEUANGAN	60
Eliza Junita A., SE., M.Pd	
Universitas Negeri Makassar	
A. Pendahuluan.....	60
B. Pengertian Literasi Ekonomi	62
C. Pengertian Literasi Keuangan.....	66
D. Literasi Ekonomi dan Keuangan dalam Perspektif Pendidikan.....	71
Referensi.....	74
Profil Penulis	77
BAB 5 KURIKULUM BERBASIS PEMBANGUNAN	
BERKELANJUTAN	78
Dr. Ratnah S, S.Pd., M.Pd	
Universitas Negeri Makassar	
A. Pendahuluan.....	78
B. Konsep Pembangunan Berkelanjutan dalam Pendidikan Ekonomi.	80
C. Landasan Pengembangan Kurikulum Pendidikan Ekonomi	
Berkelanjutan.....	87
Referensi.....	91
Profil Penulis	95
BAB 6 TRANSFORMASI PENDIDIKAN DIGITAL.....	96
Dr. Ratnah S, S.Pd., M.Pd	
Universitas Negeri Makassar	
A. Pendahuluan.....	96
B. Perubahan Paradigma Pembelajaran.....	97
C. Integrasi Teknologi dalam Proses Pembelajaran	100
D. Pengembangan Literasi Digital.....	102
E. Inovasi Metode dan Model Pembelajaran	105
F. Transformasi Peran Pendidik	107
G. Akses dan Pemerataan Pendidikan	109
Referensi.....	112
Profil Penulis	116

BAB 7 TEKNOLOGI DALAM PENDIDIKAN.....	117
Wulan Purnamasari, S.Pd., M.Pd	
Universitas Negeri Makassar	
A. PENDAHULUAN	117
B. Bentuk dan Pemanfaatan Teknologi Saat Ini	118
C. Manfaat Teknologi dalam Pendidikan	121
D. Tantangan dan Risiko	123
E. Masa Depan Pendidikan (Tren 2025-2026)	126
F. Penutup	129
Referensi.....	131
Biodata Penulis.....	135
BAB 8 PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN.....	136
Wulan Purnamasari, S.Pd., M.Pd	136
Universitas Negeri Makassar.....	136
A. Pendahuluan.....	136
B. Konsep Dasar Pendidikan Kewirausahaan	138
C. Landasan Teoretis Pendidikan Kewirausahaan.....	140
D. Tujuan dan Capaian Pembelajaran Pendidikan Kewirausahaan	142
E. Model dan Pendekatan Pembelajaran Kewirausahaan	144
F. Tantangan dan Peluang Pendidikan Kewirausahaan.....	146
G. Penutup	149
Referensi.....	151
Biodata Penulis.....	155
BAB 9 PERAN PERGURUAN TINGGI.....	156
Alfiana Damasinta, S.IP., M.Pd	
Universitas Negeri Makassar	
A. Pendahuluan.....	156
B. Landasan Filosofis dan Yuridis Peran Perguruan Tinggi	159
C. Tri Dharma Perguruan Tinggi.....	161
D. Perguruan Tinggi dan Pembangunan Berkelanjutan.....	165
E. Tantangan dan Prospek Perguruan Tinggi	167
F. Studi Kasus dan Praktik Baik Perguruan Tinggi.....	170
G. Penutup	172
Referensi.....	175
Profil Penulis	180

BAB 10 PENDIDIKAN DAN UMKM.....	181
Alfiana Damasinta, S.IP., M.Pd	
Universitas Negeri Makassar	
A. Pendahuluan.....	181
B. Konsep Dasar UMKM.....	183
C. Tantangan Umkm Di Era Global Dan Digital.....	185
D. Pendidikan sebagai Penguatan Kapasitas UMKM dan Peran Perguruan Tinggi dalam Pengembangan UMKM.....	188
E. Model Pendidikan dan Pendampingan UMKM.....	191
F. Kebijakan Pemerintah dalam Mendukung Pendidikan dan UMKM	192
G. Tantangan dan Prospek Pendidikan untuk UMKM di Masa Depan.....	194
H. Penutup	196
Referensi.....	197
Profil Penulis	201
BAB 11 ETIKA DAN KARAKTER EKONOMI	202
Dr. Andi Caezar To Tadampali, S.E., M.M	
Universitas Negeri Makassar	
A. Pendahuluan.....	202
B. Konsep Dasar Etika	203
C. Etika dalam Ilmu Ekonomi	205
D. Karakter dalam Aktivitas Ekonomi.....	206
E. Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial.....	208
F. Etika dalam Kebijakan Publik dan Pemerintahan.....	209
G. Pendidikan Karakter Ekonomi.....	211
H. Tantangan Etika di Era Digital dan Globalisasi	212
I. Studi Kasus dan Refleksi	213
J. Penutup	215
Referensi.....	217
Profil Penulis	218
BAB 12 PENDIDIKAN DAN INKLUSI KEUANGAN	219
Sri Hutami Adiningsih S., S.Pd., M.Pd.	
Universitas Negeri Makassar	
A. Pendahuluan.....	219
B. Literasi dan Pendidikan Keuangan	222

C. Pilar-Pilar Inklusi Keuangan dan Hambatannya.....	225
D. Peran Teknologi (<i>Fintech</i>) dalam Mendorong Inklusi Keuangan..	228
E. Tantangan dan Perlindungan Konsumen	231
F. Dampak Makroekonomi Literasi dan Inklusi Keuangan	233
G. Kesimpulan.....	236
Referensi.....	239
Profil Penulis	241
BAB 13 INOVASI PEMBELAJARAN	242
Sri Hutami Adiningsih S., S.Pd., M.Pd	
Universitas Negeri Makassar	
A. Pendahuluan.....	242
B. Konsep dan Teori Inovasi Pembelajaran.....	243
C. Urgensi Inovasi Pembelajaran di Era Digital.....	246
D. Model-Model Inovasi Pembelajaran.....	249
E. Peran Dosen sebagai Agen Inovasi.....	256
Referensi.....	260
Profil Penulis	264
BAB 14 KEARIFAN LOKAL DAN PENDIDIKAN	265
Dr. Muhammad Ilyas Thamrin Tahir, S.Pd., M.Pd.	
Universitas Negeri Makassar.....	
A. Pendahuluan.....	265
B. Konsep Dan Hakikat Kearifan Lokal.....	267
C. Kearifan Lokal Dalam Perspektif Pendidikan Tinggi.....	270
D. Peran Dosen Dalam Integrasi Kearifan Lokal	273
E. Peran Perguruan Tinggi Dan Pemangku Kepentingan.....	276
Referensi.....	280
Profil Penulis	282
BAB 15 SINERGI PENDIDIKAN DAN EKONOMI	283
Dr. Muhammad Ilyas Thamrin Tahir, S.Pd., M.Pd	
Universitas Negeri Makassar	
A. Pendahuluan.....	283
B. Konsep Sinergi Pendidikan dan Ekonomi	284
C. Hubungan Pendidikan dan Pertumbuhan Ekonomi	288
D. Kontribusi Ekonomi terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan.....	289
E. Sinergi Pendidikan dan Ekonomi dalam Perspektif SDGs	290
F. Studi Kasus Sinergi Pendidikan dan Ekonomi di Indonesia.....	290

G.	Keterkaitan dengan Tujuan SDGs	291
H.	Strategi Penguatan Sinergi Pendidikan dan Ekonomi	292
I.	Tantangan dan Solusi	293
J.	Kerangka Kebijakan Integratif Pendidikan dan Ekonomi Berbasis SDGs.....	293
K.	Indikator Implementasi Sinergi Pendidikan dan Ekonomi dalam Mendukung SDGs	294
L.	Implementasi Sinergi Pendidikan dan Ekonomi dalam Mendukung SDGs.....	295
M.	Penutup	296
	Referensi.....	298
	Profil Penulis	300
BAB 16 PENDIDIKAN VOKASI DAN KESIAPAN TENAGA KERJA.		301
Nurfahima S.Pd., M.Pd		
Universitas Negeri Makassar		
A.	Pendahuluan.....	301
B.	Konsep dan Landasan Teoritis Pendidikan Vokasi	302
C.	Pendidikan Vokasi sebagai Jembatan Struktural antara Pendidikan dan Pasar Kerja	303
D.	Pendidikan Vokasi dan Kesiapan Tenaga Kerja.....	304
E.	Pendidikan Vokasi dalam Perspektif Pembangunan Ekonomi	304
F.	Pendidikan Vokasi dan SDGs	305
G.	Peran Kebijakan Publik dalam Penguatan Pendidikan Vokasi	305
H.	Integrasi Hard Skills dan Soft Skills dalam Pendidikan Vokasi	306
I.	Pendidikan Vokasi dan Penguatan Kewirausahaan.....	306
J.	Strategi Penguatan Pendidikan Vokasi.....	307
K.	Tantangan dan Solusi	307
L.	Tabel Ringkasan Konseptual Pendidikan Vokasi dan Kesiapan Tenaga Kerja.....	308
M.	Indikator Kesiapan Tenaga Kerja Lulusan Pendidikan Vokasi	308
N.	Implikasi Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan Vokasi ke Depan.....	309
O.	Penilaian dan Asesmen dalam Pendidikan Vokasi untuk Kesiapan Kerja	309
P.	Penutup	310

Referensi.....	313
Profil Penulis	314
BAB 17 PENDIDIKAN, KETENAGAKERJAAN, DAN DAYA SAING GLOBAL	315
Nurliana, M.Pd	
Universitas Negeri Makassar	
A. Pendahuluan.....	315
B. Konsep Pendidikan dalam Perspektif Pembangunan SDM	316
C. Dinamika Ketenagakerjaan di Era Global	318
D. Daya Saing Global: Konsep dan Indikator	319
E. Pendidikan dan <i>Link and Match</i> dengan Dunia Kerja	320
F. Tantangan Pendidikan dan Ketenagakerjaan di Indonesia.....	322
G. Strategi Peningkatan Daya Saing Global melalui Pendidikan.....	324
H. Transformasi Kebijakan dan Tata Kelola Pendidikan untuk Daya Saing Global	325
I. Peran Inovasi, Riset, dan Kewirausahaan dalam Mendorong Daya Saing Global	327
J. Penutup	329
Referensi.....	331
Profil Penulis	332
BAB 18 PERAN PEMERINTAH DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN EKONOMI	333
Ika Wisudawaty, S.Pd., M.Pd	
Universitas Negeri Makassar	
A. Pendahuluan.....	333
B. Konsep Dasar Peran Pemerintah dalam Pendidikan dan Ekonomi.....	335
C. Kebijakan Pendidikan sebagai Instrumen Pembangunan Ekonomi.....	338
D. Kebijakan Ekonomi yang Mendukung Pendidikan	340
E. Sinergi Kebijakan Pendidikan dan Ekonomi	343
F. Tantangan dalam Integrasi Kebijakan Pendidikan–Ekonomi	346
G. Implikasi Terhadap Pembangunan Berkelanjutan	348
H. Penutup	350
Referensi.....	352
Profil Penulis	353

BAB 19 PEMBIAYAAN PENDIDIKAN UNTUK PEMBANGUNAN....	354
BERKELANJUTAN	354

Ika Wisudawaty, S.Pd., M.Pd

Universitas Negeri Makassar

A. Pendahuluan.....	354
B. Kerangka Teoretis Pembiayaan Pendidikan.....	357
C. Dimensi Pembangunan Berkelanjutan dalam Pembiayaan Pendidikan	361
D. Struktur dan Mekanisme Pembiayaan Pendidikan	364
E. Peran Strategis Dosen dalam Pembiayaan Pendidikan Berkelanjutan.....	367
Referensi.....	371
Profil Penulis	373

BAB 20 PENDIDIKAN, KESETARAAN GENDER, DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI.....	374
---	-----

Septiannisa Paramita, S.Pd., M.Pd

Universitas Negeri Makassar

A. Pendahuluan.....	374
B. Kerangka Teoretis Kesetaraan Gender dan Pendidikan.....	377
C. Pendidikan dan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	380
D. Pendidikan Tinggi dan Transformasi Sosial	384
E. Implikasi Kebijakan dan Strategi ke Depan: Pendidikan dan Kesetaraan Gender.....	387
Referensi.....	391
Profil Penulis	393

BAB 21 EVALUASI DAN DAMPAK PENDIDIKAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI	394
--	-----

Andi Zulitsnayarti Mardhani Syam, S.Pd., M.Pd

Universitas Negeri Makassar

A. Pendahuluan.....	394
B. Konsep Dasar Pendidikan dan Pertumbuhan Ekonomi	397
C. Indikator dan Ukuran Evaluasi Pendidikan	399
D. Metode Evaluasi Dampak Pendidikan terhadap Ekonomi.....	402
E. Pendidikan sebagai Investasi Modal Manusia	405
F. Dampak Pendidikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional ...	408

Referensi.....	412
Profil Penulis	415
BAB 22 STRATEGI MASA DEPAN INTEGRASI PENDIDIKAN DAN PEMBANGUNAN EKONOMI	416
Andi Zulitsnayarti Mardhani Syam, S.Pd., M.Pd	
Universitas Negeri Makassar	
A. Pendahuluan.....	416
B. Transformasi Kurikulum Berbasis Kebutuhan Ekonomi Masa Depan.....	419
C. Penguatan Ekosistem Kolaborasi Pendidikan–Industri– Pemerintah	422
D. Digitalisasi dan Inovasi Sistem Pendidikan.....	425
E. Strategi Pembiayaan dan Kebijakan Pendidikan Adaptif	427
F. Rekomendasi Strategis dan Roadmap Masa Depan Integrasi Pendidikan dan Pembangunan Ekonomi	430
Referensi.....	433
Profil Penulis	435
BAB 23 PENDIDIKAN DAN PEMBANGUNAN EKONOMI MARITIM DALAM MENDUKUNG SDGS	436
Is Arianto Pratama, S.Kel., M.Si	
Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa.....	
A. Pendahuluan.....	436
B. Konsep Pendidikan dalam Mendukung Ekonomi Maritim	439
C. Potensi dan Kontribusi Ekonomi Maritim terhadap Pembangunan.....	443
D. Keterkaitan Pendidikan Maritim dengan Tujuan SDGs	446
E. Peran Perguruan Tinggi dan Lembaga Pendidikan dalam Pengembangan Ekonomi Maritim	449
F. Strategi Penguatan Pendidikan Maritim untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan	452
Referensi.....	455
Profil Penulis	457

BAB 1

PENDIDIKAN, EKONOMI, DAN SDGs

Prof. Dr. Thamrin Tahir, M.Si.
Universitas Negeri Makassar

A. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan nasional dan global. Secara konseptual, pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai proses transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, produktivitas ekonomi, serta mobilitas sosial. Dalam perspektif teori modal manusia (*human capital theory*), pendidikan dipandang sebagai investasi yang mampu meningkatkan keterampilan, kompetensi, dan daya saing individu di pasar kerja (Becker, 1993). Investasi pendidikan yang memadai terbukti berkontribusi pada peningkatan produktivitas tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi suatu negara (Todaro & Smith, 2015).

Hubungan antara pendidikan dan pertumbuhan ekonomi telah banyak dibuktikan dalam kajian empiris. Pendidikan meningkatkan kemampuan individu dalam mengadopsi teknologi baru, mendorong inovasi, serta memperluas kesempatan kerja yang lebih produktif (Romer, 1990). Selain itu, tingkat pendidikan yang lebih tinggi berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan per kapita dan pengurangan kemiskinan, karena individu yang berpendidikan cenderung memiliki peluang kerja yang lebih stabil dan upah yang lebih tinggi (Psacharopoulos & Patrinos, 2018). Dengan demikian, pendidikan memiliki peran sentral dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam konteks pembangunan global, integrasi antara pendidikan dan ekonomi tercermin secara eksplisit dalam agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang ditetapkan oleh United Nations pada tahun 2015. SDGs terdiri atas 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang dirancang untuk mengatasi berbagai tantangan global, termasuk kemiskinan, ketimpangan, perubahan iklim, dan degradasi lingkungan (United Nations, 2015). Pendidikan secara khusus tercantum dalam Tujuan 4, yaitu memastikan pendidikan yang inklusif dan berkualitas serta mendorong kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua (*Ensure inclusive and equitable quality education and promote Lifelong Learning opportunities for all*).

Tujuan 4 SDGs memiliki keterkaitan erat dengan Tujuan 8, yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja penuh dan produktif, serta pekerjaan layak bagi semua. Pendidikan yang berkualitas menjadi fondasi dalam menciptakan tenaga kerja yang kompeten dan adaptif terhadap perubahan ekonomi global (United Nations, 2015). Tanpa sistem pendidikan yang efektif, upaya pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan akan menghadapi hambatan struktural berupa rendahnya produktivitas dan tingginya ketimpangan pendapatan.

Secara nasional, pembangunan pendidikan dan ekonomi merupakan agenda strategis dalam kerangka pembangunan jangka panjang. Pendidikan yang merata dan berkualitas diyakini mampu memperkuat daya saing bangsa di era globalisasi, khususnya dalam menghadapi revolusi industri berbasis teknologi digital. Dalam konteks ini, pendidikan tidak hanya dipandang sebagai hak dasar warga negara, tetapi juga sebagai investasi jangka panjang yang menentukan keberlanjutan pembangunan ekonomi dan sosial.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pendidikan, ekonomi, dan SDGs merupakan tiga komponen yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Pendidikan berfungsi sebagai fondasi penguatan ekonomi, sementara pertumbuhan ekonomi yang inklusif mendukung keberlanjutan sistem pendidikan. Integrasi keduanya dalam kerangka SDGs menjadi landasan penting bagi terciptanya pembangunan yang berkeadilan, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan generasi masa kini dan mendatang.

B. PENDIDIKAN SEBAGAI FONDASI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Pendidikan merupakan pilar utama dalam pembangunan berkelanjutan karena berperan langsung dalam membentuk kualitas sumber daya manusia. Dalam konteks pembangunan nasional dan global, pendidikan tidak hanya dipahami sebagai proses transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai sarana pembentukan keterampilan, sikap, nilai, dan karakter yang diperlukan untuk menghadapi tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Melalui pendidikan, individu dibekali kemampuan berpikir kritis, kreativitas, serta daya adaptasi terhadap perubahan yang semakin cepat di era globalisasi dan revolusi industri.

Pendidikan memiliki peran strategis dalam menciptakan masyarakat yang berdaya saing dan berkeadilan. Akses pendidikan yang merata memungkinkan setiap individu, tanpa memandang latar belakang sosial dan ekonomi, untuk meningkatkan kapasitas dirinya. Oleh karena itu, pendidikan dipandang sebagai instrumen penting dalam memutus rantai kemiskinan struktural dan mendorong mobilitas sosial. Dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, pendidikan menjadi fondasi bagi terciptanya masyarakat yang produktif, inovatif, dan bertanggung jawab.

Pembangunan berkelanjutan didefinisikan secara klasik sebagai upaya pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka (Brundtland Commission, 1987). Dalam arsitektur *Sustainable Development Goals* (SDGs), pendidikan (SDG 4) diposisikan bukan hanya sebagai tujuan mandiri, melainkan sebagai "*Enabler*" atau katalisator yang memungkinkan pencapaian seluruh tujuan lainnya. Jeffrey D. Sachs (2015) dalam *The Age of Sustainable Development* menekankan bahwa tanpa literasi dasar dan kemampuan berpikir kritis, masyarakat tidak akan memiliki kapasitas untuk mengadopsi teknologi baru atau memahami urgensi dari kebijakan pembangunan jangka panjang.

1. Memutus Rantai Kemiskinan Sistemik (SDG 1 & 4)

Pendidikan adalah instrumen mobilitas vertikal yang paling efektif. Secara ekonomi, pendidikan meningkatkan daya saing individu di pasar kerja. Namun, secara sosiologis, pendidikan memberikan "kesadaran kelas" kepada masyarakat miskin untuk memahami hak-hak mereka, mengakses layanan kesehatan, dan merencanakan masa depan keuangan

mereka. Investasi pada pendidikan dasar dan kejuruan secara langsung berkorelasi dengan penurunan angka kemiskinan ekstrem di suatu wilayah.

Pendidikan diakui secara global sebagai instrumen mobilitas vertikal yang paling efektif untuk memutus rantai kemiskinan tegar. Hubungan antara SDG 1 (Tanpa Kemiskinan) dan SDG 4 (Pendidikan Berkualiti) bersifat simbiotik; tanpa akses kepada pendidikan, kemiskinan akan terus diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Amartya Sen (1999) dalam bukunya *Development as Freedom* berpendapat bahawa kemiskinan bukan sekadar kekurangan pendapatan, tetapi kekurangan "kapabiliti" asas. Pendidikan memberikan manusia kemampuan untuk berfungsi dalam masyarakat, membuat keputusan yang bermaklumat, dan mengakses peluang ekonomi yang lebih luas.

Dari perspektif ekonomi makro, pelaburan dalam pendidikan awal dan menengah secara drastik mengurangkan kebergantungan masyarakat terhadap bantuan sosial kerajaan. Menurut teori Human Capital yang dikembangkan oleh Gary S. Becker (1993), setiap tahun tambahan dalam persekolahan meningkatkan potensi pendapatan individu secara signifikan (purata 8% hingga 10% setahun). Peningkatan pendapatan ini bukan sahaja mengangkat individu keluar dari garis kemiskinan, malah meningkatkan kuasa beli domestik yang menjadi pemacu pertumbuhan ekonomi negara.

Selain itu, pendidikan berfungsi sebagai agen transformasi sosiologi dalam keluarga prasejahtera. Laporan World Bank (2018) bertajuk *Learning to Realize Education's Promise* menekankan bahawa apabila seorang anak daripada keluarga miskin mendapat pendidikan berkualiti, mereka cenderung mempunyai kesihatan yang lebih baik dan merancang saiz keluarga dengan lebih bijak. Ini secara langsung membantu dalam mencapai pembangunan mampan kerana tekanan ekonomi terhadap sumber daya keluarga berkurangan. Sebagaimana ditegaskan oleh Jeffrey D. Sachs (2015), pelaburan dalam pendidikan adalah strategi "pencegahan" kemiskinan yang jauh lebih murah dan berkesan berbanding kos "pemulihan" sosial yang terpaksa ditanggung oleh negara akibat pengangguran dan keciciran pendidikan.

2. Pendidikan sebagai Jembatan Kesenjangan (SDG 5 & 10)

Ketimpangan struktural merupakan salah satu hambatan terbesar dalam mencapai keadilan global, dan pendidikan hadir sebagai instrumen utama untuk meruntuhkan tembok pemisah tersebut. Dalam kerangka SDG 10 (Berkurangnya Ketimpangan), pendidikan berfungsi sebagai *the great equalizer* yang memberikan kesempatan yang sama bagi setiap individu, terlepas dari latar belakang sosio-ekonominya. Acemoglu dan Robinson (2012) dalam karya mereka *Why Nations Fail* menegaskan bahwa institusi pendidikan yang inklusif adalah prasyarat bagi negara untuk berpindah dari sistem ekonomi ekstraktif yang hanya menguntungkan segelintir elit, menuju sistem ekonomi inklusif yang menyebarkan kemakmuran kepada seluruh lapisan masyarakat.

Fokus khusus pada SDG 5 (Kesenjangan Gender) menunjukkan bahwa mendidik perempuan memiliki efek pengganda (*multiplier effect*) yang luar biasa terhadap pembangunan nasional. Amartya Sen (1999) dalam *Development as Freedom* menyoroti bahwa agensi Perempuan, kemampuan mereka untuk mengontrol hidup sendiri sangat dipengaruhi oleh literasi dan pendidikan formal. Ketika perempuan terdidik, mereka tidak hanya memiliki akses lebih besar terhadap pasar kerja, tetapi juga memiliki kontrol lebih baik atas kesehatan reproduksi dan pendidikan anak-anak mereka. Secara ekonomi, Gary S. Becker (1993) berargumen bahwa mengabaikan pendidikan bagi perempuan adalah pemborosan modal manusia yang sangat besar, karena partisipasi perempuan dalam angkatan kerja terbukti secara signifikan meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara.

Lebih jauh lagi, pendidikan yang inklusif harus menjangkau kelompok marginal dan penyandang disabilitas untuk memastikan prinsip *Leave No One Behind* dalam SDGs benar-benar terwujud. Laporan UNESCO (2017) mengenai tujuan pembelajaran SDGs menekankan bahwa pendidikan inklusif mengajarkan empati, toleransi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, yang esensial untuk menjaga stabilitas sosial di tengah keberagaman. Sebagaimana dijelaskan oleh Jeffrey D. Sachs (2015), ketimpangan yang ekstrem adalah ancaman bagi keberlanjutan global oleh karena itu, mempersempit celah pengetahuan melalui pendidikan adalah satu-satunya cara untuk menjamin pembangunan yang adil dan berkelanjutan bagi semua.

Ketimpangan struktural merupakan manifestasi dari hambatan sistemis yang menghalangi kelompok tertentu untuk mengakses sumber daya pembangunan, di mana akses pendidikan yang tidak merata menjadi akar utamanya. Acemoglu dan Robinson (2012) dalam *Why Nations Fail* berargumen bahwa ketimpangan ini sering kali dipelihara oleh "institusi ekstraktif" yang sengaja membatasi akses pengetahuan guna mempertahankan kekuasaan elit politik dan ekonomi. Ketika akses terhadap pendidikan berkualitas hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu, terjadi pembiakan kemiskinan antargenerasi yang semakin memperlebar jurang pemisah antara kelas sosial, menghambat pencapaian SDG 10 (Berkurangnya Ketimpangan).

Secara ekonomi, distribusi pendidikan yang timpang menciptakan distorsi dalam pasar tenaga kerja. Gary S. Becker (1993) melalui teori *Human Capital* menjelaskan bahwa ketidaksetaraan investasi modal manusia menyebabkan perbedaan produktivitas yang tajam, yang pada gilirannya memicu ketimpangan upah yang ekstrem. Tanpa intervensi kebijakan yang menjamin pemerataan akses pendidikan bagi penduduk di daerah tertinggal atau kelompok minoritas, pertumbuhan ekonomi nasional hanya akan dinikmati oleh segelintir orang. Hanushek dan Woessmann (2020) memperingatkan bahwa negara dengan kesenjangan kualitas pendidikan yang besar cenderung memiliki stabilitas ekonomi yang rapuh karena rendahnya mobilitas sosial.

Dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, Jeffrey D. Sachs (2015) menegaskan bahwa ketimpangan akses pendidikan adalah pelanggaran terhadap keadilan distributif yang menjadi roh dari SDGs. Pendidikan seharusnya berfungsi sebagai "lift sosial" yang memungkinkan individu dari latar belakang ekonomi terendah sekalipun untuk mencapai potensi maksimalnya. Sebagaimana dilaporkan oleh UNESCO (2017), mengatasi ketimpangan struktural memerlukan transformasi sistemis yang mencakup penghapusan hambatan biaya, penyediaan infrastruktur digital di pelosok, dan kurikulum yang inklusif. Hanya melalui pemerataan pengetahuan, fondasi pembangunan berkelanjutan dapat berdiri tegak tanpa meninggalkan satu orang pun (*leave no one behind*).

Pemberdayaan perempuan melalui pendidikan merupakan salah satu investasi dengan imbal hasil sosial dan ekonomi tertinggi dalam agenda

pembangunan berkelanjutan. Amartya Sen (1999) dalam bukunya *Development as Freedom* menegaskan bahwa agensi Perempuan kemampuan mereka untuk membuat pilihan hidup secara mandiri adalah motor penggerak utama perubahan sosial. Pendidikan memberikan akses kepada literasi, pengetahuan hukum, dan kesadaran hak asasi yang memungkinkan perempuan keluar dari peran domestik yang membatasi dan berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan di tingkat keluarga maupun publik, yang merupakan esensi dari SDG 5 (Kesetaraan Gender).

Dari dimensi ekonomi, pemberdayaan perempuan memiliki korelasi langsung dengan peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Gary S. Becker (1993) dalam teori *Human Capital* berargumen bahwa mengeklusi perempuan dari akses pendidikan dan pasar tenaga kerja adalah bentuk pemborosan sumber daya manusia yang masif. Ketika perempuan diberdayakan secara ekonomi, terjadi efek pengganda (*multiplier effect*) karena perempuan cenderung mengalokasikan hingga 90% dari pendapatan mereka kembali ke keluarga untuk nutrisi dan pendidikan anak-anak, jauh lebih tinggi dibandingkan laki-laki (World Bank, 2018). Hal ini secara otomatis memperkuat fondasi kesehatan dan kecerdasan generasi mendatang, menciptakan siklus kesejahteraan yang berkelanjutan.

Namun, pemberdayaan perempuan sering kali terbentur pada hambatan sosiokultural dan kebijakan yang diskriminatif. Jeffrey D. Sachs (2015) menyoroti bahwa di banyak negara berkembang, ketimpangan gender dalam akses pendidikan menengah dan tinggi menghalangi tercapainya target-target pembangunan lainnya, seperti penurunan angka kematian ibu dan bayi. Oleh karena itu, UNESCO (2017) menekankan pentingnya kurikulum yang sensitif gender dan kebijakan afirmatif untuk memastikan perempuan memiliki akses yang setara terhadap bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM). Melalui pemberdayaan yang komprehensif, perempuan bukan hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, melainkan aktor kunci dalam mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan berkelanjutan sesuai amanat SDG 10 (Berkurangnya Ketimpangan).

Inklusi sosial dalam sistem pendidikan merupakan prasyarat mutlak untuk mewujudkan prinsip utama SDGs, yaitu "*Leave No One Behind*" (LNOB). Inklusi bukan sekadar memberikan akses fisik, melainkan

menciptakan ekosistem yang menghargai keberagaman dan menghilangkan hambatan sistemis bagi kelompok marginal, masyarakat adat, serta penyandang disabilitas. Amartya Sen (1999) dalam *Development as Freedom* menekankan bahwa inklusi sosial adalah tentang penghapusan "perampasan kapabilitas"; tanpa pendidikan yang inklusif, individu dari kelompok minoritas akan tetap terisolasi dari proses politik dan ekonomi, yang pada akhirnya memperlebar jurang ketimpangan sesuai target SDG 10.

Secara ekonomi, kegagalan dalam mewujudkan inklusi sosial menyebabkan kerugian produktivitas yang signifikan bagi sebuah negara. Gary S. Becker (1993) melalui teori *Human Capital* menjelaskan bahwa setiap potensi manusia yang tidak terasah karena diskriminasi akses adalah kehilangan aset ekonomi bagi bangsa tersebut. Pendidikan inklusif memastikan bahwa penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya dibekali dengan keterampilan yang relevan agar mereka dapat hidup mandiri secara ekonomi dan berkontribusi pada pertumbuhan nasional (SDG 8). World Bank (2018) juga mencatat bahwa masyarakat yang mempromosikan inklusi dalam pendidikan memiliki tingkat resiliensi ekonomi yang lebih tinggi dan tingkat konflik sosial yang lebih rendah.

Transformasi menuju pendidikan inklusif memerlukan perubahan paradigma dalam kurikulum dan kebijakan publik. UNESCO (2017) dalam panduan *Learning Objectives for SDGs* menyatakan bahwa pendidikan inklusif harus mengajarkan nilai-nilai toleransi, empati, dan kewarganegaraan global untuk mencegah eksklusi sosial di masa depan. Hal ini didukung oleh pendapat Jeffrey D. Sachs (2015) yang menegaskan bahwa pembangunan berkelanjutan mustahil dicapai jika sebagian populasi masih terpinggirkan secara sistematis. Oleh karena itu, investasi pada infrastruktur pendidikan yang aksesibel dan pelatihan guru yang responsif terhadap keberagaman adalah langkah krusial untuk menciptakan masyarakat yang adil, stabil, dan berkelanjutan.

3. Literasi Ekologis dan Adaptasi Perubahan Iklim (SDG 13)

Literasi ekologis merupakan fondasi intelektual yang mendesak untuk menanggapi krisis lingkungan global dan mencapai target SDG 13 (Penanganan Perubahan Iklim). Pendidikan dalam konteks ini tidak hanya berfungsi sebagai transfer informasi mengenai sains iklim, tetapi

sebagai alat transformasi kesadaran yang mendasar. Jeffrey D. Sachs (2015) dalam *The Age of Sustainable Development* menekankan bahwa tantangan terbesar dalam antroposen adalah keterlambatan pemahaman masyarakat mengenai batas-batas biofisik bumi. Tanpa literasi ekologis yang memadai, masyarakat akan terus terjebak dalam model pertumbuhan ekonomi linier yang merusak daya dukung planet, sehingga pendidikan harus mampu mendefinisikan ulang hubungan antara manusia dan alam.

Dalam upaya adaptasi dan mitigasi, pendidikan berperan sebagai penyedia keterampilan baru yang relevan dengan ekonomi masa depan atau *Green Skills*. Menurut laporan UNESCO (2017) mengenai tujuan pembelajaran SDGs, pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan harus membekali individu dengan kapasitas teknis dalam energi terbarukan, manajemen sumber daya air, dan pertanian regeneratif. Secara ekonomi, Gary S. Becker (1993) melalui teori *Human Capital* mengisyaratkan bahwa kemampuan adaptasi tenaga kerja terhadap perubahan lingkungan merupakan bentuk investasi modal manusia yang krusial untuk menjaga produktivitas nasional di tengah ketidakpastian iklim. Tenaga kerja yang terliterasi secara ekologis akan lebih mampu berinovasi dalam menciptakan solusi rendah karbon yang mendukung target SDG 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur).

Lebih jauh lagi, literasi ekologis berperan penting dalam membangun resiliensi masyarakat terhadap bencana iklim yang kian frekuen. Amartya Sen (1999) dalam *Development as Freedom* memandang pengetahuan sebagai elemen kunci dari "kapabilitas" manusia untuk menghadapi risiko; masyarakat yang terdidik mengenai pola cuaca dan risiko lingkungan memiliki peluang bertahan hidup dan pemulihan yang lebih tinggi. Sejalan dengan temuan UNDP (2024), investasi pada pendidikan lingkungan terbukti jauh lebih efektif secara biaya dibandingkan penanganan dampak bencana pasca-kejadian. Dengan demikian, mengintegrasikan kurikulum perubahan iklim ke dalam sistem pendidikan nasional bukan sekadar pilihan akademis, melainkan strategi pertahanan nasional yang esensial untuk menjamin keberlanjutan hidup di masa depan.

Pembangunan berkelanjutan menuntut perubahan gaya hidup yang fundamental dari pola ekstraktif menuju pola regeneratif. Di sinilah

Education for Sustainable Development (ESD) berperan sebagai katalisator perubahan perilaku secara sistemik. Jeffrey D. Sachs (2015) dalam *The Age of Sustainable Development* menegaskan bahwa krisis lingkungan global saat ini adalah hasil dari kegagalan pendidikan dalam menanamkan kesadaran akan keterbatasan biofisik bumi. ESD hadir untuk mendekonstruksi mitos bahwa alam adalah komoditas yang tak terbatas, menanamkan nilai-nilai baru bahwa keberlangsungan ekosistem adalah syarat mutlak bagi keberlanjutan ekonomi itu sendiri.

Dalam tataran praktis, ESD berperan dalam transformasi perilaku konsumen yang selaras dengan SDG 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab). UNESCO (2017) dalam panduannya mengenai tujuan pembelajaran SDGs menyatakan bahwa pendidikan harus mampu mengubah pola pikir jangka pendek menjadi pemikiran sistem jangka panjang. Dengan memahami jejak ekologis dari setiap keputusan konsumsi, individu yang terdidik melalui kerangka ESD akan beralih dari gaya hidup "ambil-buat-buang" menuju prinsip ekonomi sirkular. Secara ekonomi, perubahan perilaku ini merupakan bentuk adaptasi modal manusia yang menurut Gary S. Becker (1993) sangat penting untuk menjaga efisiensi sumber daya di tingkat nasional.

Lebih jauh lagi, pendidikan harus mampu menginternalisasi etika lingkungan ke dalam identitas personal. Amartya Sen (1999) dalam *Development as Freedom* menguraikan bahwa kebebasan sejati mencakup tanggung jawab terhadap lingkungan kolektif. Tanpa nilai-nilai baru yang diajarkan sejak dini, inovasi teknologi hijau yang diprakarsai oleh industri tidak akan memiliki basis konsumen yang cukup kuat untuk menciptakan dampak masif. Laporan UNDP (2024) juga menekankan bahwa literasi ekologis melalui ESD adalah cara yang paling organik untuk membangun resiliensi komunitas dalam menghadapi krisis iklim (SDG 13), karena perubahan yang dimulai dari kesadaran individu cenderung lebih permanen dan berdampak luas bagi kebijakan publik.

Pendidikan berperan sebagai kekuatan transformatif yang mampu mengubah pola perilaku masyarakat dari budaya konsumsi linier menuju praktik hidup berkelanjutan. Dalam konteks konsumsi energi, literasi yang ditanamkan melalui pendidikan membantu individu memahami kaitan antara penggunaan listrik domestik dengan emisi karbon global

(SDG 13). Jeffrey D. Sachs (2015) dalam *The Age of Sustainable Development* menekankan bahwa efisiensi energi bukan hanya masalah kemajuan teknologi, melainkan masalah perubahan perilaku yang berakar dari pemahaman etis. Masyarakat yang terdidik cenderung lebih proaktif dalam mengadopsi teknologi energi terbarukan dan mengurangi pemborosan energi, yang secara ekonomi meningkatkan resiliensi rumah tangga dan negara.

Selain energi, pendidikan secara fundamental mengubah cara masyarakat memandang dan mengelola limbah. Pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan mengajarkan paradigma bahwa limbah bukanlah "sampah" yang harus dibuang, melainkan sumber daya yang harus dikelola kembali dalam siklus ekonomi sirkular (SDG 12). UNESCO (2017) dalam panduan *Learning Objectives for SDGs* menyatakan bahwa pemahaman mengenai hierarki pengelolaan sampah (kurangi, gunakan kembali, daur ulang) sangat bergantung pada kemampuan kognitif dan kesadaran ekologis yang dibentuk sejak dini. Transformasi perilaku ini merupakan bentuk adaptasi modal manusia yang menurut Gary S. Becker (1993) esensial untuk meminimalkan eksternalitas negatif dari aktivitas ekonomi terhadap lingkungan.

Secara sosiologis, transformasi perilaku ini menciptakan tekanan dari bawah (*bottom-up*) bagi industri untuk memproduksi barang yang lebih ramah lingkungan. Amartya Sen (1999) dalam *Development as Freedom* menguraikan bahwa masyarakat yang memiliki kapabilitas informasi yang baik akan bertindak sebagai agen pengontrol pasar. Ketika pendidikan berhasil menanamkan nilai bahwa alam bukanlah komoditas tak terbatas, masyarakat akan menuntut transparansi pengelolaan limbah dari korporasi. Laporan UNDP (2024) juga menegaskan bahwa komunitas dengan tingkat pendidikan lingkungan yang tinggi memiliki tingkat partisipasi yang lebih besar dalam inisiatif kebersihan lingkungan lokal, yang secara langsung berkontribusi pada pencapaian pemukiman yang berkelanjutan (SDG 11).

Perguruan tinggi memegang peran krusial sebagai pusat riset dan pengembangan (R&D) yang memfasilitasi penemuan solusi teknologi bersih untuk menjawab tantangan krisis iklim global. Dalam kerangka SDG 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur), institusi akademik berfungsi sebagai laboratorium inovasi yang mengintegrasikan sains murni dengan

aplikasi praktis untuk menjaga suhu bumi. Jeffrey D. Sachs (2015) dalam *The Age of Sustainable Development* menekankan bahwa transisi menuju dekarbonisasi global sangat bergantung pada kemampuan universitas dalam menghasilkan terobosan di bidang energi terbarukan, seperti sel surya generasi baru dan teknologi penyimpanan energi (baterai) yang lebih efisien.

Selain sektor energi, perguruan tinggi menjadi motor penggerak dalam transformasi sektor pangan melalui pengembangan pertanian regeneratif. Riset akademik di bidang bioteknologi dan ekologi tanah memungkinkan terciptanya sistem pertanian yang tidak hanya produktif secara ekonomi, tetapi juga mampu menyerap karbon kembali ke dalam tanah (SDG 15). Secara ekonomi, investasi pada riset universitas merupakan bentuk pengembangan modal intelektual yang menurut Gary S. Becker (1993) dalam teori *Human Capital* akan memberikan imbal hasil jangka panjang berupa kemandirian energi dan ketahanan pangan nasional. Pendidikan tinggi memastikan bahwa inovasi yang dihasilkan bersifat berbasis data (*evidence-based*) dan selaras dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Lebih jauh lagi, sinergi antara perguruan tinggi dan industri melalui model kemitraan *Triple Helix* sangat esensial untuk mengomersialkan teknologi bersih agar dapat diadopsi secara luas oleh masyarakat (SDG 17). Amartya Sen (1999) dalam *Development as Freedom* menguraikan bahwa akses terhadap teknologi adalah salah satu pilar kebebasan ekonomi; oleh karena itu, universitas harus memastikan bahwa solusi teknologi bersih bersifat inklusif dan terjangkau bagi negara berkembang. Laporan UNESCO (2017) mengenai tujuan pembelajaran SDGs menegaskan bahwa perguruan tinggi memiliki tanggung jawab moral untuk mengarahkan risetnya pada solusi krisis antroposen, mengubah pengetahuan teoretis menjadi alat nyata untuk mitigasi perubahan iklim (SDG 13).

4. Pendidikan dan Perdamaian yang Berkelanjutan (SDG 16)

Dunia yang berkelanjutan mustahil dicapai di tengah konflik. Pendidikan kewarganegaraan global (*Global Citizenship Education*) mengajarkan toleransi, resolusi konflik tanpa kekerasan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Masyarakat yang terdidik cenderung lebih menghargai proses demokrasi dan supremasi hukum,

yang merupakan syarat mutlak bagi stabilitas pembangunan jangka panjang.

Pendidikan merupakan fondasi bagi terciptanya masyarakat yang damai, adil, dan inklusif, yang menjadi inti dari SDG 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Kuat). Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, perdamaian bukan sekadar absennya perang, melainkan kehadiran keadilan sosial yang didukung oleh institusi yang transparan. Amartya Sen (1999) dalam *Development as Freedom* menguraikan bahwa demokrasi dan perdamaian hanya dapat tumbuh subur dalam masyarakat yang memiliki kapasitas intelektual untuk berdialog dan bernegosiasi secara rasional. Pendidikan memberikan "agensi" kepada warga negara untuk memahami hak-hak mereka, sehingga mampu menuntut akuntabilitas pemerintah dan mengurangi risiko terjadinya konflik yang dipicu oleh ketidakadilan sistemik.

Secara sosiologis, pendidikan kewarganegaraan global (*Global Citizenship Education*) berperan penting dalam mereduksi prasangka dan ekstremisme yang mengancam stabilitas global. UNESCO (2017) dalam panduan *Learning Objectives for SDGs* menekankan bahwa pendidikan harus mampu mengajarkan kompetensi antarbudaya, toleransi, dan resolusi konflik tanpa kekerasan. Melalui pemahaman terhadap keberagaman, individu belajar untuk menghargai perbedaan sebagai aset, bukan sebagai ancaman. Hal ini sangat krusial bagi resiliensi bangsa; menurut Jeffrey D. Sachs (2015), ketidakstabilan sosial dan konflik bersenjata adalah penghambat utama pertumbuhan ekonomi, sehingga investasi pada pendidikan yang inklusif sebenarnya adalah investasi pada keamanan nasional dan internasional jangka panjang.

Lebih lanjut, pendidikan memperkuat supremasi hukum dengan menciptakan masyarakat yang menghormati kontrak sosial dan etika publik. Acemoglu dan Robinson (2012) dalam *Why Nations Fail* menunjukkan bahwa negara-negara dengan institusi politik yang inklusif yang sangat bergantung pada tingkat literasi warga negaranya jauh lebih stabil dan makmur dibandingkan negara dengan institusi ekstraktif yang korup. Secara ekonomi, Gary S. Becker (1993) melalui teori *Human Capital* mengisyaratkan bahwa masyarakat yang damai menciptakan iklim investasi yang kondusif, di mana modal manusia dapat berkembang maksimal tanpa gangguan krisis keamanan. Dengan demikian,

pendidikan bukan hanya sarana pencerdasan, tetapi merupakan "benteng" yang menjaga keberlanjutan pembangunan dari ancaman disintegrasi sosial.

C. PERAN PENDIDIKAN DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI

Pendidikan merupakan determinan paling fundamental dalam menentukan arah dan kecepatan pembangunan ekonomi suatu bangsa. Dalam perspektif ekonomi modern, pendidikan tidak lagi dipandang sebagai pengeluaran konsumtif, melainkan sebagai investasi strategis dalam modal manusia (human capital). Gary S. Becker (1993) dalam teori Human Capital menjelaskan bahwa peningkatan kualitas manusia melalui pendidikan secara langsung meningkatkan produktivitas marjinal tenaga kerja. Individu yang terdidik memiliki kapasitas untuk mengoperasikan teknologi kompleks dan bekerja lebih efisien, yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan nasional bruto serta mempercepat pencapaian SDG 8 mengenai pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Lebih jauh lagi, pendidikan menjadi motor penggerak bagi inovasi dan transisi menuju ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge-based economy*). Hanushek dan Woessmann (2020) dalam studinya *Education, Knowledge Capital, and Economic Growth* membuktikan secara empiris bahwa bukan sekadar jumlah tahun bersekolah yang menentukan pertumbuhan ekonomi, melainkan kualitas kognitif atau keterampilan nyata yang diperoleh siswa. Pendidikan yang menekankan pada literasi, numerasi, dan kemampuan pemecahan masalah memungkinkan sebuah negara untuk melakukan diversifikasi ekonomi dari sektor ekstraktif menuju sektor manufaktur dan jasa bernilai tinggi. Hal ini krusial untuk menghindari "jebakan pendapatan menengah" (*middle-income trap*), sebagaimana diperingatkan oleh Jeffrey D. Sachs (2015) dalam *The Age of Sustainable Development*.

Selain produktivitas dan inovasi, pendidikan memainkan peran vital dalam distribusi pendapatan dan pengentasan kemiskinan (SDG 1). Amartya Sen (1999) melalui pendekatan capability approach dalam buku *Development as Freedom* berargumen bahwa pendidikan memberikan "kebebasan ekonomi" kepada individu untuk memilih peluang kerja yang lebih baik. Dengan pemerataan akses pendidikan, ketimpangan struktural dapat dikurangi karena modal intelektual tersebar lebih merata di seluruh lapisan masyarakat.

Sebagaimana dijelaskan oleh Acemoglu dan Robinson (2012) dalam *Why Nations Fail*, negara yang memiliki institusi pendidikan yang inklusif cenderung memiliki stabilitas politik dan ekonomi yang lebih kuat, karena masyarakat memiliki alat untuk berpartisipasi secara adil dalam proses pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

Hubungan antara pendidikan dan ekonomi telah lama menjadi perhatian dalam kajian ekonomi pembangunan. Teori modal manusia (*human capital theory*) menegaskan bahwa pendidikan merupakan bentuk investasi jangka panjang yang memberikan imbal hasil berupa peningkatan produktivitas dan pendapatan individu. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin besar peluangnya untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi.

Pendidikan berperan penting dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui penguasaan keterampilan teknis dan nonteknis (*soft skills*). Keterampilan seperti kemampuan komunikasi, pemecahan masalah, dan literasi digital menjadi semakin penting dalam mendukung daya saing ekonomi. Selain itu, pendidikan juga mendorong lahirnya inovasi dan kewirausahaan, yang berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja dan penguatan ekonomi lokal.

Dalam konteks ekonomi modern, pendidikan tidak hanya menghasilkan tenaga kerja siap pakai, tetapi juga individu yang mampu menciptakan peluang ekonomi baru. Pendidikan kewirausahaan, misalnya, menjadi salah satu pendekatan strategis dalam mendorong kemandirian ekonomi dan mengurangi ketergantungan terhadap sektor formal. Dengan demikian, pendidikan memiliki peran ganda, yaitu sebagai penyedia tenaga kerja berkualitas dan sebagai penggerak inovasi ekonomi.

D. PENDIDIKAN, EKONOMI, DAN AGENDA *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* (SDGs)

Keterkaitan pendidikan dan ekonomi secara eksplisit tercermin dalam kerangka *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pendidikan berkualitas menjadi fokus utama pada Tujuan 4 (*Quality Education*), yang menekankan pentingnya pendidikan inklusif, adil, dan berkualitas serta kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua. Pendidikan dipandang sebagai kunci untuk mencapai berbagai tujuan

SDGs lainnya, termasuk tujuan-tujuan di bidang ekonomi dan kesejahteraan sosial.

Dalam konteks ekonomi, SDGs menekankan pentingnya pengentasan kemiskinan (Tujuan 1: *No Poverty*), pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (Tujuan 8: *Decent Work and Economic Growth*), serta pengurangan kesenjangan (Tujuan 10: *Reduced Inequalities*). Pendidikan memiliki peran sentral dalam mendukung pencapaian tujuan-tujuan tersebut melalui peningkatan kapasitas individu dan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan ekonomi.

Pendidikan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja dan konteks lokal dapat mendorong terciptanya tenaga kerja yang kompeten dan berdaya saing. Selain itu, pendidikan juga berkontribusi dalam membangun kesadaran ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan, sehingga pertumbuhan ekonomi tidak hanya berorientasi pada peningkatan output, tetapi juga pada pemerataan manfaat dan perlindungan lingkungan.

Pendidikan merupakan determinan paling fundamental dalam menentukan arah dan kecepatan pembangunan ekonomi suatu bangsa. Dalam perspektif ekonomi modern, pendidikan tidak lagi dipandang sebagai pengeluaran konsumtif, melainkan investasi strategis dalam modal manusia (*human capital*). Gary S. Becker (1993) dalam teori *Human Capital* menjelaskan bahwa peningkatan kualitas manusia melalui pendidikan secara langsung meningkatkan produktivitas marjinal tenaga kerja. Individu yang terdidik memiliki kapasitas untuk mengoperasikan teknologi kompleks dan bekerja lebih efisien, yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan nasional bruto serta mempercepat pencapaian SDG 8 mengenai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan pekerjaan layak.

pendidikan menjadi motor penggerak bagi inovasi dan transisi menuju ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge-based economy*). Hanushek dan Woessmann (2020) dalam studinya *Education, Knowledge Capital, and Economic Growth* membuktikan secara empiris bahwa kualitas kognitif atau keterampilan nyata yang diperoleh siswa memiliki korelasi linear terhadap pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Di era krisis iklim, pendidikan harus mampu menghasilkan "*Green Skills*" untuk mendukung SDG 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur). Sebagaimana ditegaskan oleh Jeffrey D. Sachs (2015), transisi menuju dekarbonisasi global sangat bergantung pada

kemampuan universitas dan pusat riset dalam menemukan solusi teknologi bersih dan energi terbarukan guna menjaga suhu bumi (SDG 13).

Dalam dimensi sosial, pendidikan berfungsi sebagai instrumen utama untuk mencapai keadilan ekonomi dan pengentasan kemiskinan (SDG 1). Amartya Sen (1999) melalui pendekatan *capability approach* dalam buku *Development as Freedom* berargumen bahwa pendidikan memberikan "kebebasan ekonomi" kepada individu untuk memilih peluang kerja yang lebih baik, sehingga memutus rantai kemiskinan intergenerasi. Akses pendidikan yang inklusif bagi perempuan dan kelompok marginal adalah kunci untuk mencapai SDG 5 (Kesetaraan Gender) dan SDG 10 (Berkurangnya Ketimpangan). Acemoglu dan Robinson (2012) dalam *Why Nations Fail* menunjukkan bahwa negara dengan institusi pendidikan yang inklusif cenderung memiliki stabilitas politik dan ekonomi yang lebih kuat karena kekuasaan dan peluang tidak hanya terkonsentrasi pada segelintir elit.

Pembangunan berkelanjutan menuntut perubahan gaya hidup dari pola konsumsi yang ekstraktif menuju pola yang bertanggung jawab (SDG 12). Di sinilah *Education for Sustainable Development* (ESD) berperan penting dalam mengubah paradigma masyarakat mengenai lingkungan. UNESCO (2017) dalam panduan *Learning Objectives for SDGs* menyatakan bahwa pendidikan harus mampu menanamkan nilai bahwa alam bukanlah komoditas yang tak terbatas. Melalui literasi ekologis, masyarakat terdorong untuk mentransformasi cara mereka mengonsumsi energi dan mengelola limbah. Laporan UNDP (2024) juga menekankan bahwa masyarakat yang terdidik secara lingkungan memiliki resiliensi yang lebih tinggi terhadap guncangan iklim, yang esensial untuk menjaga stabilitas ekonomi global di masa depan.

E. INTEGRASI PENDIDIKAN DAN EKONOMI DALAM PEMBANGUNAN BERBASIS MASYARAKAT

Dalam praktik pembangunan, integrasi antara pendidikan dan ekonomi menjadi semakin penting, khususnya dalam konteks pembangunan berbasis masyarakat. Program pendidikan yang dirancang sesuai dengan kebutuhan lokal, seperti pendidikan vokasi, pelatihan keterampilan, dan peningkatan literasi keuangan, terbukti mampu mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan pendapatan, tetapi juga memperkuat kapasitas sosial dan kelembagaan masyarakat.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) dan program pemberdayaan menjadi contoh konkret bagaimana pendidikan dapat diintegrasikan dengan pengembangan ekonomi lokal. Melalui pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan, masyarakat didorong untuk mengembangkan usaha produktif yang sesuai dengan potensi wilayahnya. Pendekatan partisipatif menjadi kunci keberhasilan program-program tersebut agar hasilnya dapat dirasakan secara berkelanjutan.

Selain itu, pendidikan juga berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap prinsip pembangunan berkelanjutan. Pemahaman tentang konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, efisiensi penggunaan sumber daya, serta pelestarian lingkungan menjadi bagian penting dalam membangun sistem ekonomi yang berkelanjutan. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan keberlanjutan pembangunan bagi generasi mendatang.

Pembangunan berbasis masyarakat (*Community-Based Development*) yang efektif mensyaratkan integrasi yang erat antara penguatan kapasitas pendidikan lokal dan pemberdayaan ekonomi. Dalam model ini, pendidikan tidak hanya berlangsung di sekolah formal, tetapi juga melalui pusat belajar masyarakat yang mengajarkan keterampilan praktis sesuai dengan potensi ekonomi daerah. Amartya Sen (1999) dalam *Development as Freedom* menekankan bahwa pembangunan sejati terjadi ketika masyarakat memiliki kapabilitas untuk mengorganisir diri mereka sendiri. Dengan membekali warga dengan literasi fungsional dan keterampilan manajerial, komunitas dapat mengelola sumber daya lokal secara mandiri, yang secara langsung mendukung pencapaian SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi).

Secara ekonomi, integrasi ini memperkuat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui transfer pengetahuan dan teknologi. Gary S. Becker (1993) melalui teori *Human Capital* menunjukkan bahwa pelatihan berbasis komunitas merupakan cara paling efisien untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja di sektor informal. Pendidikan vokasi yang selaras dengan kebutuhan pasar lokal memastikan bahwa investasi modal manusia tidak sia-sia, melainkan langsung terserap ke dalam aktivitas produktif. Jeffrey D. Sachs (2015) berargumen bahwa ekonomi sirkular tingkat komunitas di mana limbah diolah kembali menjadi produk bernilai tambah

hanya dapat terwujud jika masyarakat mendapatkan pendidikan teknis yang memadai mengenai keberlanjutan (SDG 12).

Sinergi antara pendidikan dan ekonomi berbasis masyarakat menciptakan resiliensi sosial yang kuat terhadap fluktuasi ekonomi global. Acemoglu dan Robinson (2012) dalam *Why Nations Fail* menggarisbawahi pentingnya institusi ekonomi yang inklusif di tingkat akar rumput untuk mencegah marginalisasi. Melalui koperasi dan kelompok usaha bersama yang berbasis pengetahuan, masyarakat tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi subjek yang menentukan arah kemajuannya sendiri. Laporan UNESCO (2017) menegaskan bahwa pendidikan yang berakar pada konteks lokal membantu menjaga identitas budaya sekaligus mengadopsi inovasi modern, yang esensial untuk pembangunan berkelanjutan yang harmonis dan berjangka panjang.

F. STUDI KASUS INDONESIA: PENDIDIKAN SEBAGAI PENGGERAK PEMBANGUNAN EKONOMI BERKELANJUTAN

1. Pendidikan Vokasi dan Link and Match dengan Dunia Usaha dan Industri

Indonesia menghadapi tantangan ketenagakerjaan yang kompleks, seperti tingginya tingkat pengangguran terdidik dan kesenjangan antara kompetensi lulusan dan kebutuhan dunia kerja. Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah Indonesia mendorong penguatan pendidikan vokasi melalui konsep link and match antara lembaga pendidikan dan dunia usaha serta dunia industri (DUDI). Kebijakan ini bertujuan agar kurikulum dan proses pembelajaran lebih relevan dengan kebutuhan pasar kerja.

Program revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan penguatan pendidikan vokasi di perguruan tinggi menjadi contoh nyata implementasi pendidikan yang berorientasi ekonomi. Melalui kerja sama dengan industri, peserta didik tidak hanya memperoleh pengetahuan teoretis, tetapi juga keterampilan praktis dan pengalaman kerja. Dampaknya terlihat pada peningkatan peluang kerja lulusan dan kontribusi terhadap pencapaian SDGs Tujuan 4 (Pendidikan Berkualitas) dan Tujuan 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi).

2. Pendidikan Kewirausahaan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pendidikan kewirausahaan menjadi salah satu strategi penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia, khususnya dalam menghadapi bonus demografi. Melalui integrasi materi kewirausahaan dalam kurikulum pendidikan menengah dan tinggi, peserta didik didorong untuk memiliki pola pikir kreatif, inovatif, dan mandiri. Pendidikan kewirausahaan tidak hanya berorientasi pada penciptaan usaha, tetapi juga pada penguatan karakter dan keterampilan hidup (*life skills*).

Di berbagai daerah, program pelatihan kewirausahaan yang dipadukan dengan pengabdian kepada masyarakat (PkM) telah menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Contohnya adalah pelatihan pengolahan hasil pertanian dan kelautan, pendampingan usaha mikro, serta penguatan literasi keuangan bagi pelaku UMKM. Program-program tersebut berkontribusi langsung terhadap pengentasan kemiskinan (SDGs Tujuan 1) dan pengurangan kesenjangan ekonomi (SDGs Tujuan 10).

3. Program Indonesia Pintar dan Pengurangan Kemiskinan

Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Melalui bantuan biaya pendidikan, PIP membantu mencegah angka putus sekolah dan memastikan keberlanjutan pendidikan bagi kelompok rentan. Program ini menunjukkan bagaimana intervensi di sektor pendidikan dapat memberikan dampak jangka panjang terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi.

Dengan meningkatnya tingkat partisipasi pendidikan, peluang generasi muda untuk memperoleh pekerjaan yang layak menjadi lebih besar. Dalam jangka panjang, hal ini berkontribusi pada peningkatan kualitas tenaga kerja nasional dan pengurangan kemiskinan struktural. Program Indonesia Pintar mencerminkan integrasi kebijakan pendidikan dan ekonomi dalam mendukung pencapaian SDGs secara simultan.

4. Pendidikan Berbasis Masyarakat dan Pembangunan Ekonomi Lokal

Di tingkat lokal, berbagai inisiatif pendidikan berbasis masyarakat telah berkontribusi pada pengembangan ekonomi berkelanjutan. Program pendidikan nonformal, pelatihan keterampilan, dan pemberdayaan komunitas menjadi sarana penting dalam meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat, terutama di wilayah pedesaan dan pesisir.

Sebagai contoh, pelatihan pengolahan hasil laut dan pengembangan usaha berbasis sumber daya lokal di kawasan pesisir tidak hanya meningkatkan nilai tambah produk, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip SDGs yang menekankan pembangunan inklusif dan berbasis potensi lokal. Pendidikan dalam konteks ini berfungsi sebagai katalisator pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan.

5. Refleksi terhadap Pencapaian SDGs di Indonesia

Studi kasus Indonesia menunjukkan bahwa integrasi pendidikan dan ekonomi merupakan strategi efektif dalam mendukung pencapaian SDGs. Kebijakan dan program pendidikan yang dirancang secara kontekstual dan inklusif mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, tantangan masih tetap ada, seperti kesenjangan kualitas pendidikan antarwilayah, keterbatasan akses di daerah terpencil, serta kebutuhan akan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.

Oleh karena itu, penguatan peran pendidikan sebagai penggerak pembangunan ekonomi perlu terus diupayakan melalui kebijakan yang berkelanjutan, inovatif, dan berbasis kolaborasi. Dengan pendekatan tersebut, pendidikan dapat menjadi motor utama dalam mewujudkan pembangunan Indonesia yang selaras dengan agenda *Sustainable Development Goals*.

REFERENSI

- Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2012). *Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty*. New York: Crown Business.
- Amartya Sen. (1999). *Development as Freedom*. Oxford: Oxford University Press.
- Badan Pusat Statistik. (2023). Indikator pendidikan dan ketenagakerjaan Indonesia. BPS.
- Becker, G. S. (1993). *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education* (3rd ed.). Chicago: The University of Chicago Press.
- Gary S. Becker. (1993). *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education* (3rd ed.). Chicago: University of Chicago Press.
- Jeffrey D. Sachs. (2015). *The Age of Sustainable Development*. New York: Columbia University Press.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2021). Program Indonesia Pintar: Laporan pelaksanaan. Kemendikbud.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2020). Revitalisasi pendidikan vokasi di Indonesia. Kemendikbudristek.
- Kementerian PPN/Bappenas. (2020). Peta jalan SDGs Indonesia. Bappenas.
- OECD. (2019). *Education at a glance 2019: OECD indicators*. OECD Publishing.
- Psacharopoulos, G., & Patrinos, H. A. (2018). Returns to investment in education: A decennial review of the global literature. *Education Economics*, 26(5), 445–458.
- Romer, P. M. (1990). Endogenous technological change. *Journal of Political Economy*, 98(5), S71–S102.
- Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Oxford University Press.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic Development* (12th ed.). Boston: Pearson.

- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic development* (13th ed.). Pearson Education.
- UNESCO. (2017). *Education for Sustainable Development Goals: Learning Objectives*. Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
- United Nations. (2015). *Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development*. United Nations.
- World Bank. (2018). *World development report 2018: Learning to realize education's promise*. World Bank Publications.
- World Bank. (2020). *Indonesia human capital review*. World Bank Publications.

PROFIL PENULIS



Prof. Dr. Thamrin Tahir, M.Si.

Dosen Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Penulis merupakan Dosen Program Studi Pendidikan Ekonomi, Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar. Penulis merupakan Guru Besar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar (UNM) dengan keahlian utama di bidang ekonomi, sosiologi ekonomi, dan pendidikan. Pendidikan dasar hingga menengah ditempuh

di Sidenreng Rappang, kemudian melanjutkan studi S1 pada Program Pendidikan Ekonomi Umum di IKIP Ujung Pandang dan lulus pada tahun 1986. Gelar Magister Sains diperolehnya dari Program Studi Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan, Universitas Hasanuddin pada tahun 1998. Penulis menempuh pendidikan doktoral dalam bidang Sosiologi di Universitas Negeri Makassar, serta mengikuti program *Doctoral Sandwich* di The Ohio State University, Columbus, Ohio, USA pada tahun 2008–2009. Penulis telah menghasilkan berbagai publikasi ilmiah yang memperkaya khazanah pengetahuan di bidang ekonomi, sosiologi dan pendidikan.

Email: thamrin@unm.ac.id

BAB 2

PENDIDIKAN DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Prof. Dr. Thamrin Tahir, M.Si.
Universitas Negeri Makassar

A. PENDAHULUAN

Memasuki abad ke-21, masyarakat global dihadapkan pada tantangan yang kompleks, mulai dari krisis iklim yang ekstrem, ketimpangan sosial yang tajam, hingga ancaman terhadap ketersediaan sumber daya alam di masa depan. Menanggapi situasi tersebut, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah merumuskan Agenda 2030 yang berfokus pada 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). Namun, pencapaian target-target besar tersebut mustahil terwujud tanpa adanya perubahan mendasar pada agen penggeraknya, yaitu manusia itu sendiri (Sachs, 2015).

Di sinilah pendidikan memegang peran sentral sebagai "jantung" dari seluruh proses pembangunan. Pendidikan tidak lagi cukup hanya dipandang sebagai sarana untuk meningkatkan kecerdasan intelektual atau memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja. Lebih dari itu, pendidikan dalam konteks pembangunan berkelanjutan harus dipahami sebagai proses transformatif yang membekali setiap individu dengan kesadaran moral dan kapasitas teknis untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan kelestarian ekologi (UNESCO, 2017).

Dalam implementasinya, pendidikan tidak hanya berperan sebagai penyampai teori, melainkan sebagai laboratorium inovasi yang menghubungkan kemajuan teknologi dengan etika lingkungan. Melalui riset dan pengembangan di lembaga pendidikan, lahir solusi-solusi cerdas seperti energi terbarukan dan sistem pengolahan limbah sirkular yang memungkinkan industri tetap tumbuh tanpa merusak biosfer. Hal ini menciptakan pergeseran paradigma di mana kesuksesan ekonomi suatu bangsa tidak lagi diukur semata-mata dari pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), tetapi juga dari seberapa kecil jejak ekologis yang ditinggalkan dan seberapa besar kontribusinya terhadap pemulihan bumi (Gardner, 2011).

Pendidikan dalam pembangunan berkelanjutan berupaya melakukan internalisasi nilai-nilai kelekatan manusia dengan alam ke dalam praktik kehidupan sehari-hari. Proses ini membentuk individu yang memiliki "kecerdasan ekologis", yaitu kemampuan untuk memahami keterkaitan antara pilihan konsumsi pribadi dengan krisis global seperti pemanasan bumi. Dengan demikian, pendidikan berfungsi sebagai alat kontrol sosial yang efektif; ia membangun masyarakat yang secara sukarela mengadopsi pola hidup hemat energi, pengurangan plastik, dan perlindungan keanekaragaman hayati karena mereka memahami bahwa kesejahteraan manusia tidak mungkin dipisahkan dari kesehatan ekosistem global (Goleman, 2009).

Selain penguatan pada dimensi individu, pendidikan juga bertindak sebagai perekat hubungan antar-generasi yang menjamin keberlangsungan keadilan lingkungan di masa depan. Pendidikan mengajarkan bahwa sumber daya yang tersedia saat ini bukanlah warisan dari nenek moyang untuk dihabiskan, melainkan titipan dari anak cucu yang harus dikelola dengan penuh integritas. Dengan menanamkan rasa tanggung jawab lintas generasi, pendidikan mencegah terjadinya eksploitasi berlebihan yang didorong oleh keuntungan jangka pendek, serta mendorong terciptanya kebijakan publik yang lebih berorientasi pada ketahanan ekologis jangka panjang daripada sekadar pertumbuhan ekonomi sesaat (Weiss, 1989).

Pada akhirnya, efektivitas pendidikan dalam pembangunan berkelanjutan sangat bergantung pada kolaborasi antara institusi formal, keluarga, dan masyarakat luas dalam menciptakan ekosistem belajar yang konsisten. Transformasi menuju dunia yang berkelanjutan tidak dapat dicapai hanya melalui instruksi di dalam kelas, melainkan melalui pengalaman langsung dan keteladanan dalam struktur sosial. Ketika nilai-nilai keberlanjutan telah

terintegrasi sepenuhnya ke dalam budaya masyarakat, maka pendidikan telah berhasil menjalankan misi tertingginya, yaitu menciptakan peradaban manusia yang mampu hidup berdampingan secara harmonis dengan alam semesta tanpa mengorbankan martabat kemanusiaan (Orr, 2004).

Implementasi dari misi tertinggi tersebut menuntut adanya restrukturisasi kurikulum yang tidak lagi bersifat tersekat dalam disiplin ilmu tunggal, melainkan bersifat interdisipliner dan kontekstual. Pendidikan harus mampu menghubungkan realitas ekonomi global dengan batas-batas biofisik planet, sehingga setiap inovasi yang lahir dari rahim institusi pendidikan selalu dibarengi dengan analisis dampak lingkungan yang mendalam. Dengan pendekatan ini, pendidikan tidak hanya mencetak tenaga kerja terampil, tetapi juga melahirkan warga negara global yang memiliki komitmen politik dan sosial untuk memperjuangkan kebijakan yang pro-lingkungan dan pro-keadilan di tingkat lokal maupun internasional (Nussbaum, 2010).

Restrukturisasi ini memerlukan pergeseran metode pembelajaran dari yang bersifat teoretis-pasif menjadi partisipatif-aktif, di mana siswa dilibatkan langsung dalam memecahkan masalah nyata di komunitas mereka. Melalui pendekatan *Service Learning* atau pembelajaran berbasis pengabdian, peserta didik dapat mengaplikasikan ilmu yang mereka peroleh untuk menjawab tantangan lokal, seperti krisis air bersih atau pengelolaan limbah pemukiman. Sinergi antara teori akademis dan aksi lapangan ini tidak hanya memperkuat pemahaman kognitif, tetapi juga membangun resiliensi dan karakter tangguh yang diperlukan untuk menghadapi ketidakpastian iklim yang semakin meningkat di masa depan (Bringle dan Hatcher, 1996).

Sebagai penutup, tantangan besar pembangunan berkelanjutan sejatinya adalah perlombaan antara kecepatan kesadaran manusia dan kecepatan kerusakan ekosistem. Pendidikan adalah satu-satunya instrumen yang memiliki daya jangkauan jangka panjang untuk memenangkan perlombaan tersebut melalui pembentukan nurani kolektif yang kokoh. Tanpa penguatan jalur pendidikan, segala instrumen hukum dan inovasi teknologi hanyalah solusi sementara yang tidak menyentuh akar permasalahan. Oleh karena itu, investasi dalam pendidikan yang berkelanjutan merupakan investasi paling hakiki bagi kelangsungan peradaban, yang memastikan bahwa bumi tetap menjadi rumah yang layak bagi kehidupan manusia dalam harmoni yang abadi (Meadows *et al.*, 2004).

Pendidikan merupakan "mesin utama" dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Melalui konsep yang dikenal sebagai *Education for Sustainable Development* (ESD), pendidikan bukan hanya soal transfer ilmu, tapi soal transformasi perilaku. Berikut ini peran pendidikan dalam pembangunan berkelanjutan:

B. FONDASI PERUBAHAN PERILAKU DAN POLA PIKIR

Pendidikan memiliki peran strategis sebagai fondasi perubahan perilaku dan pola pikir masyarakat menuju keberlanjutan. Transformasi tersebut tidak hanya menysasar aspek kognitif, tetapi juga dimensi afektif dan konatif individu dalam memandang relasi antara manusia dan lingkungan. Pendidikan untuk keberlanjutan (*education for sustainable development*) dipahami sebagai proses pembelajaran yang mendorong perubahan paradigma dari pola pikir eksploitatif menuju pola pikir yang mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan (Wals & Jickling, 2002). Melalui pendekatan ini, peserta didik diarahkan untuk mengembangkan kesadaran kritis terhadap praktik konsumsi yang berlebihan serta dampaknya terhadap degradasi lingkungan.

Salah satu aspek fundamental dalam perubahan tersebut adalah literasi lingkungan. Literasi lingkungan tidak sekadar mencakup pengetahuan tentang ekosistem, tetapi juga kemampuan memahami keterbatasan sumber daya alam serta implikasi ekologis dari aktivitas manusia. Penelitian menunjukkan bahwa peningkatan literasi lingkungan berkorelasi positif dengan perilaku pro-lingkungan dan pengambilan keputusan yang lebih bertanggung jawab (Monroe *et al.*, 2019). Dengan demikian, pendidikan berfungsi sebagai instrumen untuk menanamkan kesadaran bahwa sumber daya alam bersifat terbatas dan memerlukan pengelolaan yang bijaksana agar tetap tersedia bagi generasi mendatang.

Selain literasi lingkungan, pendidikan juga berperan dalam membangun etika keberlanjutan. Etika ini berakar pada prinsip tanggung jawab antargenerasi (*intergenerational responsibility*), yaitu pengakuan bahwa generasi sekarang memiliki kewajiban moral untuk menjaga kualitas lingkungan bagi generasi berikutnya. Konsep tersebut ditegaskan dalam kajian etika lingkungan yang menyatakan bahwa keberlanjutan mensyaratkan keadilan lintas waktu dan distribusi manfaat sumber daya secara adil (Kopnina

& Meijers, 2014). Pendidikan yang mengintegrasikan nilai-nilai etis dalam kurikulum akan membentuk kesadaran moral peserta didik bahwa eksploitasi sumber daya tanpa batas bertentangan dengan prinsip keadilan ekologis.

Lebih lanjut, pendidikan untuk keberlanjutan mendorong terjadinya perubahan pola pikir (*mindset shift*) dari orientasi jangka pendek menuju perspektif jangka panjang. Transformasi ini melibatkan pengembangan kemampuan berpikir sistemik, yakni kemampuan memahami keterkaitan antara aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam satu kesatuan yang utuh (Wals & Jickling, 2002). Dengan demikian, pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai proses pembentukan karakter dan kesadaran kolektif yang mendukung pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendidikan memiliki fungsi fundamental dalam membangun fondasi perubahan perilaku dan pola pikir menuju keberlanjutan. Melalui penguatan literasi lingkungan dan internalisasi etika tanggung jawab antargenerasi, pendidikan berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang lebih sadar, reflektif, dan bertanggung jawab terhadap kelestarian bumi.

C. PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) BERKUALITAS

Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas merupakan prasyarat fundamental dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Transformasi menuju ekonomi berkelanjutan menuntut tenaga kerja yang tidak hanya memiliki kompetensi teknis, tetapi juga pemahaman sistemik terhadap keterkaitan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam konteks ini, pendidikan dan pelatihan berperan sebagai instrumen strategis untuk membentuk kapasitas adaptif dan inovatif yang relevan dengan tantangan global abad ke-21 (UNESCO, 2017). SDM yang unggul menjadi motor penggerak inovasi dalam menciptakan solusi berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendukung keberlanjutan.

Salah satu elemen utama dalam pengembangan SDM berkelanjutan adalah penguatan keterampilan hijau (*Green Skills*). Keterampilan hijau merujuk pada seperangkat kompetensi teknis, manajerial, dan etis yang memungkinkan individu berkontribusi pada pengurangan dampak lingkungan

serta peningkatan efisiensi sumber daya. Menurut analisis kebijakan ketenagakerjaan hijau, *Green Skills* mencakup kemampuan di bidang energi terbarukan, efisiensi energi, pengelolaan limbah, dan teknologi rendah karbon (Bowen & Kuralbayeva, 2015). Dengan demikian, sistem pendidikan perlu mengintegrasikan kurikulum berbasis keberlanjutan agar lulusan memiliki kesiapan untuk memasuki sektor-sektor ekonomi hijau yang terus berkembang.

Lebih lanjut, pembangunan berkelanjutan juga menuntut kemampuan berpikir kritis sebagai fondasi pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kemampuan ini memungkinkan individu untuk menganalisis konsekuensi jangka panjang dari kebijakan ekonomi terhadap aspek sosial dan lingkungan. Pendidikan yang berorientasi pada keberlanjutan mendorong pengembangan keterampilan reflektif, evaluatif, dan analitis dalam menilai dampak multidimensional suatu kebijakan (Sterling, 2010). Dengan berpikir kritis, individu tidak hanya menerima kebijakan secara normatif, tetapi mampu mengkaji implikasi ekologis dan sosialnya secara komprehensif.

Selain itu, penguatan SDM berkualitas juga berkaitan dengan kemampuan inovasi. Inovasi berkelanjutan mensyaratkan integrasi pengetahuan lintas disiplin serta kolaborasi antara sektor pendidikan, industri, dan pemerintah. Studi mengenai transisi menuju ekonomi hijau menegaskan bahwa investasi pada pendidikan dan pelatihan berbasis keberlanjutan berkontribusi signifikan terhadap peningkatan daya saing sekaligus pengurangan risiko lingkungan (OECD, 2011). Oleh karena itu, pengembangan SDM tidak dapat dipisahkan dari reformasi sistem pendidikan yang adaptif terhadap dinamika global.

Secara keseluruhan, pembangunan berkelanjutan mensyaratkan SDM yang memiliki keterampilan hijau dan kemampuan berpikir kritis sebagai dua pilar utama. Integrasi kedua aspek tersebut dalam sistem pendidikan akan menghasilkan tenaga ahli yang mampu merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kebijakan serta inovasi yang sejalan dengan prinsip keberlanjutan. Dengan demikian, pengembangan SDM berkualitas bukan sekadar investasi pendidikan, melainkan strategi jangka panjang dalam memastikan keberlanjutan pembangunan.

REFERENSI

- Aghion, P., Dechezleprêtre, A., Hémous, D., Martin, R., & Van Reenen, J. (2016). Carbon taxes, path dependency, and directed technical change: Evidence from the auto industry. *Journal of Political Economy*, 124(1), 1–51. <https://doi.org/10.1086/684581>
- Ardoin, N. M., Bowers, A. W., & Gaillard, E. (2020). Environmental education outcomes for conservation: A systematic review. *Biological Conservation*, 241, 108224. <https://doi.org/10.1016/j.biocon.2019.108224>
- Bajaj, M., & Chiu, B. (2009). Education for sustainable development as peace education. *Journal of Peace Education*, 6(4), 441–455. <https://doi.org/10.1080/17400200903370923>
- Bowen, A., & Kuralbayeva, K. (2015). Looking for green jobs: The impact of green growth on employment. Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment Policy Paper, 1–20.
- Bringle, R. G., & Hatcher, J. A. (1996). *Implementing Service Learning in Higher Education*. The Journal of Higher Education. (Mendiskusikan efektivitas pembelajaran berbasis aksi dalam meningkatkan tanggung jawab sosial siswa).
- Elkington, J. (1998). Partnerships from cannibals with forks: The triple bottom line of 21st-century business. *Environmental Quality Management*, 8(1), 37–51. <https://doi.org/10.1002/tqem.3310080106>
- Gardner, H. (2011). *The Unschooled Mind: How Children Think and How Schools Should Teach*. New York: Basic Books. (Membahas mengenai pentingnya pemahaman mendalam dan penerapan etika dalam proses belajar untuk menghadapi tantangan dunia nyata).
- Goleman, D. (2009). *Ecological Intelligence: How Knowing the Hidden Impacts of What We Buy Can Change Everything*. New York: Broadway Books. (Menjelaskan pentingnya literasi ekologis dalam membentuk perilaku konsumen yang bertanggung jawab).
- Klasen, S., & Lamanna, F. (2009). The impact of gender inequality in education and employment on economic growth in developing countries: Updates and extensions. *Feminist Economics*, 15(3), 91–132. <https://doi.org/10.1080/13545700902893106>

- Kopnina, H., & Meijers, F. (2014). Education for sustainable development (ESD): Exploring theoretical and practical challenges. *Journal of Cleaner Production*, 62, 131–138. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2013.07.029>
- Meadows, D. H., *et al.* (2004). *Limits to Growth: The 30-Year Update*. White River Junction: Chelsea Green Publishing. (Menekankan perlunya perubahan fundamental dalam cara manusia memahami batas-batas pertumbuhan melalui edukasi sistemik).
- Monroe, M. C., Plate, R. R., Oxarart, A., Bowers, A., & Chaves, W. A. (2019). Identifying effective climate change education strategies: A systematic review of the research. *Environmental Education Research*, 25(6), 791–812. <https://doi.org/10.1080/13504622.2017.1360842>
- Nussbaum, M. C. (2010). *Not for Profit: Why Democracy Needs the Humanities*. Princeton: Princeton University Press. (Menjelaskan pentingnya pendidikan yang membentuk kapasitas berpikir kritis dan empati warga negara dalam menghadapi isu global).
- OECD. (2011). *Towards Green Growth*. Paris: OECD Publishing.
- Orr, D. W. (2004). *Earth in Mind: On Education, Environment, and the Human Prospect*. Washington DC: Island Press. (Menekankan bahwa semua pendidikan adalah pendidikan lingkungan dan perlunya merombak cara manusia belajar agar selaras dengan sistem pendukung kehidupan di bumi).
- Psacharopoulos, G., & Patrinos, H. A. (2018). Returns to investment in education: A decennial review of the global literature. *Education Economics*, 26(5), 445–458. <https://doi.org/10.1080/09645292.2018.1484426>
- Purvis, B., Mao, Y., & Robinson, D. (2019). Three pillars of sustainability: In search of conceptual origins. *Sustainability Science*, 14(3), 681–695. <https://doi.org/10.1007/s11625-018-0627-5>
- Sachs, J. D. (2015). *The Age of Sustainable Development*. New York: Columbia University Press. (Memberikan tinjauan komprehensif mengenai latar belakang munculnya tantangan global dan perlunya pendekatan pembangunan yang terintegrasi).

- Sterling, S. (2010). Transformative learning and sustainability: Sketching the conceptual ground. *Learning and Teaching in Higher Education*, 5, 17–33.
- UNESCO. (2016). *Global Education Monitoring Report 2016: Education for People and Planet*. Paris: UNESCO Publishing.
- UNESCO. (2017). *Education for Sustainable Development Goals: Learning Objectives*. Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. (Menegaskan posisi pendidikan sebagai pendorong utama bagi seluruh 17 tujuan pembangunan berkelanjutan).
- Unterhalter, E. (2014). Education, gender and development. *International Journal of Educational Development*, 35, 208–217. <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2013.10.004>
- Wals, A. E. J., & Jickling, B. (2002). “Sustainability” in higher education: From doublethink and newspeak to critical thinking and meaningful learning. *Environmental Education Research*, 8(3), 221–232. <https://doi.org/10.1080/13504620220145474>
- Weiss, E. B. (1989). *In Fairness to Future Generations: International Law, Common Patrimony, and Intergenerational Equity*. Tokyo: United Nations University Press. (Membahas konsep keadilan antargenerasi sebagai fondasi moral dan hukum dalam pembangunan berkelanjutan).

PROFIL PENULIS



Prof. Dr. Thamrin Tahir, M.Si.

Dosen Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Penulis merupakan Dosen Program Studi Pendidikan Ekonomi, Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar. Penulis merupakan Guru Besar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar (UNM) dengan keahlian utama di bidang ekonomi, sosiologi ekonomi, dan pendidikan. Pendidikan dasar hingga menengah ditempuh

di Sidenreng Rappang, kemudian melanjutkan studi S1 pada Program Pendidikan Ekonomi Umum di IKIP Ujung Pandang dan lulus pada tahun 1986. Gelar Magister Sains diperolehnya dari Program Studi Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan, Universitas Hasanuddin pada tahun 1998. Penulis menempuh pendidikan doktoral dalam bidang Sosiologi di Universitas Negeri Makassar, serta mengikuti program *Doctoral Sandwich* di The Ohio State University, Columbus, Ohio, USA pada tahun 2008–2009. Penulis telah menghasilkan berbagai publikasi ilmiah yang memperkaya khazanah pengetahuan di bidang ekonomi, sosiologi dan pendidikan.

Email: thamrin@unm.ac.id

INTEGRASI PENDIDIKAN DAN PEMBANGUNAN EKONOMI DALAM MEWUJUDKAN SDGS



Buku ini terdiri dari 23 bab yang membahas berbagai perspektif mengenai hubungan antara pendidikan dan pembangunan ekonomi, mulai dari kajian konseptual, kebijakan, hingga praktik implementasi di berbagai konteks. Setiap bab ditulis oleh para akademisi dan praktisi yang memiliki perhatian dan kepedulian terhadap upaya peningkatan kualitas pendidikan serta pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Melalui beragam pendekatan dan sudut pandang yang disajikan, buku ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana pendidikan dapat berperan sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi sekaligus sebagai instrumen strategis dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.



IKAPI
IKATAN AKADEMIK DAN PROFESI INDONESIA

CV. Tahta Media Group
Surakarta, Jawa Tengah
Web : www.tahtamedia.com
Ig : [tahtamedia](https://www.instagram.com/tahtamedia)
Telp/WA : +62 896-5427-3996

